

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti saat ini, pembangunan nasional dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks terutama pada sektor usaha dan industri. Salah satu contoh dari era globalisasi ini adalah berlakunya pasar bebas di berbagai kawasan, tak terkecuali di Asia Tenggara. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah salah satu contoh pasar bebas antar negara-negara anggota ASEAN yang mulai berlaku pada tahun ini. Untuk menghadapi persaingan dalam pasar bebas seperti MEA tersebut, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing baik dalam kualitas maupun produktifitas. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas diperlukan suatu program pengembangan sumber daya manusia dengan pendidikan yang baik. Pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan salah satunya seperti yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya mencakup dasar dan tujuan, penyelenggaraan pendidikan termasuk wajib belajar, penjaminan kualitas pendidikan serta peran masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut dibuat untuk menghasilkan pendidikan Indonesia yang baik dan lulusan berkualitas di setiap jenjang pendidikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian dibentuk pula Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai badan yang menentukan 8 (delapan) standar dan kriteria pencapaian penyelenggaraan pendidikan. Adapun standar-standar yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Peraturan Pemerintah, 2005:4) tersebut yaitu; (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Kompetensi Lulusan; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: kurikulum, tenaga kependidikan, proses belajar mengajar, sarana prasarana pembelajaran, manajemen sekolah dan lingkungan. Dengan adanya faktor pendukung yang memadai akan menjamin kelancaran proses pembelajaran sehingga mampu menghasilkan kualitas lulusan yang baik dan kompeten di dunia kerja.

Kurikulum sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, di dalam kurikulum telah diatur tentang visi, misi, strategi, tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum (jam pelajaran real), waktu dan beban belajar siswa dan kalender akademik. Landasan kurikulum diambil dari penjelasan UU No.20 Tahun 2003 yang menerangkan bahwa pengembangan dan pelaksanaan kurikulum harus berbasis kompetensi. Dalam UU No.20 Tahun 2003 pasal 35 yang menerangkan bahwa kompetensi lulusan merupakan

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah lanjutan tingkat atas yang mempunyai spesifikasi keahlian tertentu. Sejalan dengan tujuan pendidikan SMK yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruanannya, maka pendidikan di SMK mengedepankan lulusan yang berkompeten dan sesuai dengan kriteria minimal sumber daya manusia yang dibutuhkan di dunia industri/kerja. Oleh sebab itu, pendidikan SMK harus dikelola dengan menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Namun, pada kenyataannya banyak lulusan SMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri, akibatnya banyak lulusan SMK yang menjadi pengangguran. Hal ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pengangguran per Agustus 2015 sebanyak 7,6 juta orang atau 6,18% dari total 122,4 juta orang angkatan kerja. Dari jumlah pengangguran tersebut didominasi lulusan SMK 12,65%, lulusan SMA 10,32% lulusan Diploma 7,54%, Sarjana 6,40%, Sekolah Menengah Pertama 6,22% dan Sekolah Dasar dibawah 2,74%.

Data di atas membuktikan bahwa lulusan SMK menempati peringkat tertinggi dari berbagai lulusan jenjang pendidikan yang menjadi pengangguran, yaitu sebesar 12,65% . Kualitas tamatan yang rendah ini terjadi karena adanya kesenjangan (*miss match*) antara jenis, kualifikasi dan jumlah sumber daya manusia yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan

kejuruan dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh pihak industri serta kurangnya kesiapan dari pihak sekolah dalam menerapkan standar sarana prasarana pembelajaran.

Salah satu cara untuk mengatasi persoalan di atas adalah dengan cara memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang telah tercantum pada PP No 25 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan pemenuhan standar isi, proses, kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan serta penilaian pendidikan seperti yang tercantum dalam SNP, maka kualitas lulusan yang dihasilkan SMK akan mempunyai lulusan yang mempunyai daya saing dalam dunia industri.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lulusan SMK. Dengan manajemen sarana dan prasarana yang baik, maka proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Begitu juga sebaliknya, jika manajemen sarana dan prasarana kurang baik, jumlah sarana dan prasarana kurang memadai, maka proses belajar mengajar akan terganggu dan hasil pembelajaran menjadi kurang optimal. Sementara itu masih ada fenomena pembelajaran praktik di SMK yang belum mempunyai sarana praktik baik berupa *engine stand* maupun media pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar Krisnadi (2013) tentang kelengkapan bengkel kompetensi keahlian ototronik di SMK Negeri 2 Karanganyar, dikemukakan bahwa terdapat 6 standar kompetensi (21,43%) yang belum mempunyai *engine stand* atau trainer.

Salah satu cara untuk mengatasi persoalan terkait sarana dan prasarana adalah dengan menerapkan standar sarana dan prasarana sesuai dengan yang diatur dalam Permendiknas No.40 tahun 2008 tentang standar sarana prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri 2008 menyebutkan bahwa; “Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) wajib menerapkan standar sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan”. Selain itu sarana dan prasarana juga wajib memenuhi rasio minimum sesuai standar sarana dan prasarana yang wajib diterapkan di SMK tersebut.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari ketua jurusan dan guru-guru pada program studi Teknik Ototronik SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen, didapatkan bahwa dalam melaksanakan praktikum di bengkel setiap rombongan belajar terdiri dari sejumlah 44 siswa yang didampingi oleh 2 orang guru pengampu. SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen masih baru dan baru ada 1 angkatan yang lulus. Selain kondisi tersebut, keterbatasan sarana praktek menjadi kendala yang dihadapi pendidik.

Berdasarkan standar kompetensi yang tertuang dalam Permendiknas No. 28 Tahun 2009 terdapat tiga standar kompetensi pada teknik ototronik yaitu standar kompetensi memperbaiki sistem pengapian elektronik, memperbaiki sistem injeksi elektronik, dan memperbaiki sistem pengatur elektronik yang memerlukan *engine stand* sebagai sarana praktik.

Dengan standar rasio peralatan mesin otomotif 1 set/area untuk 16 peserta didik, untuk praktik tiga standar kompetensi tersebut pihak sekolah setidaknya memiliki sembilan *engine stand*. Namun sejauh ini SMK Taman Karya Pertambangan Kebumen baru memiliki empat *engine stand*. Tentu keterbatasan sarana praktik tersebut dapat menyebabkan kegiatan belajar mengajar yang kurang optimal, sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai pun menjadi kurang optimal. Dengan keterbatasan sarana praktik tersebut, maka diperlukan manajemen perawatan sarana praktik agar sarana yang ada dapat digunakan secara optimal.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menerapkan standar sarana dan prasarana sesuai dengan Permendiknas No. 40 tahun 2008. Dalam lampiran permendiknas no 40 tahun 2008 disebutkan tentang peralatan untuk pekerjaan mesin otomotif yaitu 1 set/area untuk minimum 16 peserta didik. Sehingga setidaknya pihak sekolah memiliki 9 *engine stand* untuk praktik standar kompetensi memperbaiki sistem pengapian elektronik, memperbaiki sistem injeksi elektronik, dan memperbaiki sistem pengatur elektronik

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka manajemen sarana prasarana sangat perlu dilakukan untuk menunjang kualitas pendidikan demi tercapainya kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Mengingat begitu pentingnya manajemen sarana prasarana maka sudah selayaknya bagi semua pihak untuk menjaga dan meningkatkan manajemen sarana prasarana baik dalam perencanaan perawatan, pelaksanaan perawatan maupun pengawasan perawatan. Oleh karena itu maka perlu dilakukan

penelitian secara mendalam dan terfokus tentang manajemen sarana praktik program studi teknik Ototronik SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kualitas lulusan SMK yang masih rendah

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pengangguran per Agustus 2015 sebanyak 7,6 juta orang atau 6,18% dari total 122,4 juta orang angkatan kerja. Dari jumlah pengangguran tersebut didominasi lulusan SMK 12,65%, lulusan SMA 10,32% lulusan Diploma 7,54%, Sarjana 6,40%, Sekolah Menengah Pertama 6,22% dan Sekolah Dasar dibawah 2,74%.

Dari data di atas embuktikan bahwa kualitas lulusan SMK masih tergolong rendah. Data ini menunjukkan lulusan SMK sebagai penyumbang pengangguran tertinggi dari berbagai jenjang pendidikan yaitu sebesar 12,65%. Kualitas tamatan yang rendah ini terjadi karena adanya kesenjangan (*miss match*) antara jenis, kualifikasi dan jumlah sumber daya manusia yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan kejuruan dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh pihak industri serta kurangnya standar sarana prasarana yang diterapkan oleh pihak sekolah.

Hal tersebut bertolak belakang dengan UU No.20 Tahun 2003 pasal 35 yang menerangkan bahwa kompetensi lulusan merupakan

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati guna menghasilkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sifat spesialisasi kejuruan dan persyaratan dunia industri dan dunia usaha. Salah satu cara untuk mengatasi persoalan di atas adalah dengan cara memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang telah tercantum pada PP No 25 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan pemenuhan standar isi, proses, kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan serta penilaian pendidikan seperti yang tercantum dalam SNP, maka kualitas lulusan yang dihasilkan SMK akan mempunyai lulusan yang mempunyai daya saing dalam dunia industri.

2. Sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan yang tidak sesuai standar

Merujuk pada Permendiknas No.40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) pasal 4 bahwa; "Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) wajib menerapkan standar sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan".

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lulusan SMK. Dengan manajemen sarana dan

prasarana yang baik, maka proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Begitu juga sebaliknya, jika manajemen sarana dan prasarana kurang baik, jumlah sarana dan prasarana kurang memadai, maka proses belajar mengajar akan terganggu dan hasil pembelajaran menjadi kurang optimal. Sementara itu masih ada fenomena pembelajaran praktik di SMK yang belum mempunyai sarana praktik baik berupa *engine stand* maupun media pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar Krisnadi (2013) tentang kelengkapan bengkel kompetensi keahlian ototronik di SMK Negeri 2 Karanganyar, dikemukakan bahwa terdapat 6 standar kompetensi (21,43%) yang belum mempunyai *engine stand* atau trainer.

Salah satu cara untuk mengatasi persoalan terkait sarana dan prasarana adalah dengan menerapkan standar sarana dan prasarana sesuai dengan yang diatur dalam Permendiknas No.40 tahun 2008 tentang standar sarana prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri 2008 menyebutkan bahwa; "Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) wajib menerapkan standar sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan". Selain itu sarana dan prasarana juga wajib memenuhi rasio minimum sesuai standar sarana dan prasarana yang wajib diterapkan di SMK tersebut.

3. Keterbatasan sarana praktik di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen

Berdasarkan standar kompetensi yang tertuang dalam Permendiknas No. 28 Tahun 2009 terdapat tiga standar kompetensi pada teknik ototronik yaitu standar kompetensi memperbaiki sistem pengapian elektronik, memperbaiki sistem injeksi elektronik, dan memperbaiki sistem pengatur elektronik yang memerlukan *engine stand* sebagai sarana praktik. Dengan standar rasio peralatan mesin otomotif 1 set/area untuk 16 peserta didik, untuk praktik tiga standar kompetensi tersebut pihak sekolah setidaknya memiliki sembilan *engine stand*. Namun sejauh ini SMK Taman Karya Pertambangan Kebumen baru memiliki empat *engine stand* untuk praktik ke tiga standar kompetensi tersebut dengan jumlah 44 peserta didik per kelas.. Tentu keterbatasan sarana praktik tersebut dapat menyebabkan kegiatan belajar mengajar yang kurang optimal, sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai pun menjadi kurang optimal.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menerapkan standar sarana dan prasarana sesuai dengan Permendiknas No. 40 tahun 2008. Dalam lampiran permendiknas no 40 tahun 2008 disebutkan tentang peralatan untuk pekerjaan mesin otomotif yaitu 1 set/area untuk minimum 16 peserta didik. Sehingga setidaknya pihak sekolah memiliki 9 *engine stand* untuk praktik standar kompetensi memperbaiki sistem pengapian elektronik, memperbaiki sistem injeksi elektronik, dan memperbaiki sistem pengatur elektronik.

4. Perlunya manajemen perawatan sarana praktik

Selain keterbatasan sarana praktik di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen, agar sarana praktik yang ada di SMK dapat berfungsi dengan optimal, maka diperlukan manajemen perawatan sarana praktik. Dengan manajemen perawatan yang baik, maka dapat mencegah kerusakan sarana praktik. Jika terjadi kerusakan pada sarana praktik, maka dapat segera di lakukan perbaikan.

Berdasarkan Permendiknas No.69 Tahun 2009 biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. Biaya perawatan dan perbaikan ringan untuk program keahlian teknik mekanik otomotif yaitu sebesar Rp. 67.200,00 per rombongan belajar.

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang berkaitan dengan sekolah kejuruan sangatlah luas dan kompleks, oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian lebih terarah dan dapat dikaji lebih mendalam. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu dengan menitikberatkan pada manajemen perawatan sarana praktik Program Studi Teknik Ototronik di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perawatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah peneliti mengajukan beberapa permasalahan mengenai manajemen sarana praktik di bengkel ototronik sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan perawatan sarana praktik Program Studi Teknik Ototronik di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen?
2. Bagaimana pelaksanaan perawatan sarana praktik Program Studi Teknik Ototronik di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen?
3. Bagaimana pengawasan perawatan sarana praktik Program Studi Teknik Ototronik di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen?

E. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perencanaan perawatan sarana praktik Program Studi Teknik Ototronik di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan perawatan sarana praktek Program Studi Teknik Ototronik di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen.
3. Mendeskripsikan pengawasan perawatan sarana praktik Program Studi Teknik Ototronik di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak hanya dari satu pihak, akan tetapi bagi pihak yang lain juga. Manfaat yang diharapkan secara lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagi SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi pengembangan dan peningkatan kesiapan SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen dalam penyelenggaraan program studi teknik ototronik terkait sarana dan prasarana. Sehingga akan meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana di SMK yang tentunya akan berdampak pada hasil lulusan yang kompeten dan mempunyai daya saing yang tinggi.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini merupakan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian yang hasil penelitian ini digunakan perguruan tinggi sebagai persembahan kepada masyarakat.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai wahana dalam melatih kemampuan menulis karya tulis ilmiah, disamping itu diharapkan dapat membangkitkan minat mahasiswa lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bidang evaluasi pendidikan.